

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap potensi pajak kendaraan bermotor pada di Provinsi NTT selama tahun 2011-2014, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 70,898,108,026 dengan jumlah potensi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 78.294.800.659. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor paling besar adalah Kota Kupang sebesar Rp 24,877,339,553, dan daerah kabupaten yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor paling kecil adalah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp 773,650,743. Pada tahun 2012, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni sebesar Rp 82,441,171,728, dengan potensi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 90,633,985,041. Daerah Kabupaten yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor paling besar adalah Kota Kupang sebesar Rp 27,333,713,765, dan daerah kabupaten yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor paling kecil adalah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp 584,595,360. Pada tahun 2013, bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 97.337.481.839, dengan potensi pajak kendaraan bermotor yakni sebesar Rp 108,760,223,801. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor paling

besar adalah Kota Kupang sebesar Rp 33,439,000,175, dan daerah kabupaten yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor paling kecil adalah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp 708,242,370. Pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 110,650,301,442, dengan potensi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 122,438,491,450. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi pajak paling besar adalah Kota Kupang sebesar Rp 37,178,283,209, dan daerah kabupaten yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor paling kecil adalah Kabupaten Malaka sebesar Rp 405,269,580.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak kendaraan bermotor yaitu rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar, yang dapat berpengaruh pada besarnya penerimaan pajak untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk pembangunan daerah, karena masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengolah potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum memadai, dalam hal terbatasnya kendaraan dinas operasional roda 2 maupun roda 4 dalam menjangkau wajib pajak dalam proses sosialisasi kepada wajib pajak, tidak seimbang antara jumlah petugas pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya, Disiplin kerja pegawai Dinas Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dikatakan masih cukup disiplin, terbukti dari berbagai aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang belum semua dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dari segi tanggung jawab belum bisa dijalankan dengan baik sehingga dibutuhkan kesadaran yang

tinggi dari masing-masing pegawai Dinas Pendapatan Dan Aset Daerah, untuk lebih meningkatkan kedisiplinan guna pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik, Kemampuan kinerja aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT, baik itu pimpinan maupun staf pegawai yang terlibat dalam upaya pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini persepsi aparatur, kemampuan administrasi dalam menanggapi pelaksanaan tugas administrasi pada Pemerintah Daerah belum memberikan tanggapan dan penilaian terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT harus lebih proaktif memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan nasional dan mendata semua objek pajak yang belum terdaftar sehingga dapat dibayar oleh pemilik objek pajak.
2. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT harus lebih meningkatkan kinerja kerjanya, dengan melakukan kegiatan pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi wajib pajak dan mendata semua objek pajak yang belum terdaftar agar dapat dibayar.
3. Pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor diperhatikan dengan baik agar mencapai hasil yang optimal, sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Dasril. Munir, Djuanda Arys Henry, Tangkilisan S. Nogi Hesel, (2004), *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta
- Dodu, Klaudia Maria, 2013. *Analisis Potensi, Efektifitas, dan Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kupang*, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Mandira Kupang.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ismail, Rian. 2011. *Analisis Efektivitas, Kontribusi, Dan Potensi Kendaraan Bermotor Sebagai Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo*, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi.
- Kurniawan. Panca dan Purwanto. 2004. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Bayu Media, Malang.
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mboi, Maria, 2012. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Dinas Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang
- Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rahayu, Betty, 2011. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005-2009*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
- Renggi, Palapaty, 2012. *Analisis Kontribusi Derajat Kontribusi Laba Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang*, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Tiwow, Febriati, 2010. *Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Pada Dispenda Kota Semarang*, Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Panca Bakti Pontianak.
- Umar, Husein, 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Dan Retribusi .
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Yunanto, Lilik, 2010. *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efektifitas, Efisiensi, dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*, Skripsi Jurusan Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.